

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI PENYUSUNAN
ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD**

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:
VONNY NOFISA AMRIL
12960/2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD" (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung)

Nama : Vonny Nofisa Amril

NIM/BP : 12960 / 2009

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2014

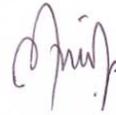
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



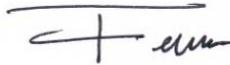
Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Pada Tanggal 23 Juli 2014**

**Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan
Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung)**

Nama : Vonny Nofisa Amril
Bp/Nim : 2009/12960
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2014

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Ketua : Lili Anita, SE, M.Si, Ak



2. Sekretaris : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak



3. Anggota : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak



4. Anggota : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vonny Nofisa Amril
NIM/Thn.Masuk : 12960/2009
Tempat/Tgl Lahir : Kampung Baru, 1 November 1991
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Baru Depan SPBU Indarung No. 63, Padang
No. Hp/Telpon : 082389759323
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sujungjung*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2014

Yang menyatakan,



Vonny Nofisa Amril

BP/Nim: 2009/12960

ABSTRAK

Vonny Nofisa Amril (2009/12960). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2014.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak
Pembimbing II : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD. (2) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. (3) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. (2) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. (3) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran agar kinerja manajerial SKPD dapat terus ditingkatkan. (2) Untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial SKPD.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu tim penguji dan penelaah.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

5. Pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Kakak beserta Adik-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2009 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	10
1. Kinerja Manajerial	10
2. Akuntabilitas Publik.....	16
a. Pengertian	16
b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas	19
c. Lingkup Akuntabilitas Publik	19
3. Partisipasi Penyusunan Anggaran	21
a. Konsep Anggaran	21
b. Fungsi Anggaran	22
c. Proses dan Prosedur Penyusunan Anggaran	24
d. Partisipasi Penyusunan Anggaran	27
4. Kejelasan Sasaran Anggaran	30
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Hubungan Antar Variabel	34
D. Kerangka Konseptual	38
E. Hipotesis	40

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi Dan Sampel	41
C. Jenis Data	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Variabel Penelitian	44
G. Pengukuran Variabel.....	45
H. Instrumen Penelitian	46
I. Uji Validitas Dan Reliabilitas	48
J. Hasil Uji Coba Instrumen	48
K. Uji Asumsi Klasik	49
L. Analisis Data	51
M. Definisi Operasional	53

BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Demografi Responden	56
C. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	67
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	68
E. Hasil Penelitian	71
F. Pembahasan	76

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Keterbatasan	81
C. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kabupaten Sijunjung	42
2. Skala Pengukuran.....	46
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	47
4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation.....	49
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	55
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	58
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	59
10. Statistik Deskriptif	60
11. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Publik	61
12. Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran	63
13. Distribusi Frekuensi Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran	64
14. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Manajerial SKPD	65
15. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian.....	67
16. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian	68
17. Uji Normalitas	69
18. Uji Multikolinearitas	70
19. Uji Heteroskedastisitas	71
20. Koefisien Determinasi (R^2)	71
21. Koefisien Regresi Berganda	72
22. Uji F Statistik	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	88
2. Tabulasi Data Pilot Test.....	94
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pilot Test	98
4. Tabulasi Data Penelitian.....	104
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	116
6. Uji Asumsi Klasik	122
7. Uji F dan Uji t	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Pemerintah daerah, sebagai organisasi sektor publik dituntut memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja yang baik tercipta dari adanya kegiatan penyelesaian tugas secara

optimal, sedangkan kerja yang optimal terlaksana apabila pegawai dapat menggunakan kemampuan, pengetahuan dan bakatnya serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin yang nantinya akan meningkatkan kinerja dari manajerial tersebut.

Menurut Mahoney *et. al.* (1963) dalam Natalia (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah.

Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah, oleh karena itu kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja manajerial pemerintah daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial SKPD adalah : 1) akuntabilitas publik

(Citra, 2010; Yusri, 2012; Deki, 2013); 2) partisipasi penyusunan anggaran (Andarias, 2009; Nur, 2011; Irzal, 2012); dan kejelasan sasaran anggaran (Samuel, 2008; Syafrial, 2009; Nadirsyah, 2011).

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Terdapat empat unsur akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002).

Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja manajerial pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal.

Disamping akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran juga dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD. Menurut Brownell dalam Coryanata (2004:619) partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Adanya partisipasi mendorong setiap manajer untuk meningkatkan prestasinya dan menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya juga (Bambang, 2002). Indikator untuk menilai partisipasi penyusunan anggaran diantaranya adalah keterlibatan manajer dalam proses penyusunan anggaran, alasan atasan dalam merevisi anggaran yang diusulkan, frekuensi pemberian saran dan pendapat, pengaruh manajer dalam anggaran akhir, pentingnya kontribusi yang diberikan, dan frekuensi penyampaian pendapat.

Menurut Kenis (1979) dalam Andarias (2009) partisipasi aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan seberapa besar tingkat keterlibatan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah dan diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting karena aparatur pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan

anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.

Disamping partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran juga dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD. Menurut Kenis (1979) dalam Andarias (2009) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Indikator dalam pengukuran kejelasan sasaran anggaran, diantaranya tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, dan koordinasi.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafrial, 2009). Dengan adanya

kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparaturn pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, pencapaian target kinerja APBD selama tahun 2012 telah mencerminkan keberhasilan dan realisasi kinerja masing-masing program. Karena APBD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2009, dimana program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan umum. Pencapaian target kinerja baru bisa ditampilkan berdasarkan realisasi pencapaian masing-masing SKPD.

Berdasarkan laporan realisasi APBD tahun 2012 terdapat empat SKPD yaitu Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Pertenakan dan Perikanan yang realisasi anggarannya dibawah 85% dari yang dianggarkan. Kinerja dari empat SKPD ini belum maksimal dikarenakan realisasi APBD belum mencapai target, maksudnya belum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja dari empat SKPD ini perlu ditingkatkan lagi. (Laporan Realisasi APBD Tahun 2012 Kabupaten Sijunjung)

Adapun penelitian yang dilakukan Citra (2010) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas se-Kota Semarang.

Andarias (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, pada penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samuel (2008) tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial dengan motivasi sebagai variabel intervening.

Dari penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang. Adapun beda dari penelitian sebelumnya yaitu dalam hal pengambilan sampel, pengukuran variabel, dan tempat penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu seperti yang penulis gambarkan diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung).**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD?
2. Sejauhmana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD?
3. Sejauhmana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang :

1. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD
2. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD
3. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat bermanfaat sebagai masukan dalam memaksimalkan kinerja manajerial.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.